

BAB II

LATAR BELAKANG BERDIRINYA ORGANISASI DHARMA WANITA

A. Pergerakan Kaum Wanita 1966-1974

Pada tahun 1965 di Indonesia terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi yang berhaluan kiri, yaitu PKI dan Gerwani. PKI melakukan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap ketujuh jenderal di Lubang Buaya. Gerwani dituduh ikut dalam penyiksaan terhadap ketujuh jenderal.¹ Tertuduhnya organisasi Gerwani selain Gerwani merupakan organisasi wanita yang berafiliasi dengan PKI karena saat peristiwa itu terjadi sebagian anggota Gerwani sedang mengikuti latihan yang dilakukan di Lubang Buaya.

Pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap tujuh jenderal di Lubang Buaya segala hal yang berhubungan dengan komunis dihancurkan termasuk organisasi PKI dan Gerwani. Aksi pergolakan ini dipelopori oleh KAMI² yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965 oleh tujuh belas organisasi mahasiswa di berbagai daerah.³ KAMI saat itu melakukan aksi demonstrasi agar pemerintah segera membubarkan organisasi PKI dan Gerwani. Terbentuknya KAMI menggerakkan golongan kaum wanita untuk melakukan aksi yang sama, maka pada tanggal 9 Maret 1966 kaum

¹ Saskia Wieringa, *Penghancuran Organisasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kalyanamitra, 1999, hlm. 498.

² KAMI adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI pada saat itu ikut berperan dalam pembersihan Komunis di Indonesia.

³ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1978, hlm. 169.

wanita membentuk (KAWI).⁴ KAWI ikut berperan dalam mendampingi aksi yang dilakukan oleh para pemuda, pelajar, mahasiswa, dan sarjana untuk membersihkan dari segala unsur golongan kiri. KAWI terdiri dari berbagai golongan kaum wanita tetapi kebanyakan dari kaum wanita yang berasal dari golongan agama.⁵ Pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru KAWI sangat berperan aktif dalam mendirikan pemerintahan Orde Baru, tetapi setelah masa Orde Baru berdiri peranan KAWI tidak terlihat dalam pergerakan kaum wanita.

Pada tahun 1966 pemerintah melakukan pembersihan terhadap Perwari dari segala unsur golongan kiri. Sejumlah istri anggota yang berasal dari golongan kiri ditarik dari jabatan dan kedudukannya dari organisasi Perwari. Anggota-anggota organisasi ini yang mempunyai keterkaitan dengan golongan kiri dipaksa untuk keluar dari organisasi ini.⁶ Perwari ketika masa Orde Lama merupakan salah satu organisasi wanita besar dan radikal dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita yang tertindas. Masa Orde Baru organisasi Perwari tidak lagi menjadi organisasi besar yang aktif tetapi Perwari menjadi organisasi yang tak berdaya.

Masa Orde Baru bukan hanya membersihkan organisasi Perwari dari segala hal yang berhubungan dengan golongan kiri, tetapi juga melakukan

⁴ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 271.

⁵ Saskia Wieringa, *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. 1998, Jakarta: Kalyanmitra, hlm. 32.

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

perubahan dalam Perwari. Organisasi Perwari yang dahulunya merupakan organisasi radikal diubah menjadi organisasi fungsional, organisasi yang berisikan anggota-anggota istri pegawai. Organisasi PERWARI di bawah pemerintahan Orde Baru tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan ketika masa Orde Lama seperti kegiatan yang berhubungan dengan kaum wanita miskin. Pada masa Orde Baru organisasi ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan organisasi istri seperti perkumpulan-perkumpulan kaum istri.

Kaum wanita ketika memasuki pemerintahan Orde Baru mengalami proses *domestikasi*, dengan implikasi terjadinya penjinakan, *segregasi* dan *depolitisasi*.⁷ Organisasi wanita dijinakan dalam aturan-aturan dan kebijakan pemerintah Orde Baru sehingga perjuangan kaum wanita secara revolusioner tidak terlihat lagi dalam pergerakan kaum wanita Indonesia. Masa Orde Baru kegiatan organisasi wanita diatur dan kegiatan-kegiatan organisasi wanita yang berhubungan dengan politik dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru juga melakukan pengelompokan terhadap organisasi-organisasi wanita seperti organisasi Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri dan organisasi Dharma Pertiwi untuk istri dari ABRI.

⁷ Nilai tradisi moral digali untuk melegitimasi moral kaum perempuan Orde Baru. Anggota organisasi perempuan yang progresif-revolusioner dikatakan sebagai “perempuan kejam” kemudian dihadapkan dengan “perempuan baik” yang jinak serta melakukan kegiatan melulu keperempuanan dan tidak melakukan perlawanan terhadap elemen yang merugikan perempuan. Ruth Indiah Rahayu. 2004. “Politik Gender Orde Baru”. Dalam Liza Hafidz (Ed). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, hlm. 424.

Praktik domestikasi wanita dilakukan dengan dua cara yaitu reproduksi subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki melalui berbagai kebijakan publik dan pembentukan beragam organisasi-organisasi istri, kooptasi organisasi kemasyarakatan.⁸ Masa Orde Baru kebijakan publik yang ditetapkan lebih mesuperioritaskan kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita. Masa Orde Baru memang lebih banyak ditandai dengan pembentukan organisasi istri yang lebih beragam dibandingkan dengan pembentukan organisasi wanita yang memperjuangkan nasib kaum wanita.

Masa Orde Baru di bawah presiden Soeharto terjadi diskriminasi dan eksploitasi terhadap organisasi wanita. Diskriminasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru mengatur segala kegiatan organisasi wanita termasuk kegiatan politik. Pada masa Orde Lama organisasi wanita banyak yang bernaung di bawah dan berafiliasi partai politik, tetapi ketika masa Orde Baru membatasi kegiatan organisasi wanita dengan partai politik. Pemerintah Orde Baru juga melakukan eksploitasi terhadap kaum wanita dengan cara organisasi wanita diwajibkan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Organisasi wanita tidak melakukan perlawanan terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang terjadi pada masa awal pemerintahan Orde Baru.

Pada awal pemerintahan, Orde Baru mendapat dukungan dari organisasi wanita Islam. Organisasi wanita Islam ikut mendukung

⁸ D.Triwibowo. 2006, "Gerakan Perempuan di Indonesia". *Basis*, No. 01-02 tahun ke 55, hlm. 29.

pemerintahan Orde Baru dalam memberantas organisasi wanita yang berhaluan kiri. Organisasi wanita Islam sejak dahulu kontra terhadap organisasi yang berhaluan kiri, oleh karena itu organisasi wanita Islam mendukung pemerintahan Orde Baru dalam memberantas organisasi yang berhaluan kiri.

Organisasi wanita Islam tidak lepas dari kegiatan pengawasan dan penataan pemerintah Orde Baru. Organisasi Islam hanya boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan seperti pengajian dan organisasi wanita Islam dilarang membicarakan keburukan-keburukan pemerintah.⁹ Penataan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap organisasi wanita Islam menimbulkan rasa kekecewaan yang dirasakan oleh organisasi wanita Islam.

Memasuki pemerintahan Orde Baru organisasi wanita ditata dan dikontrol secara ketat. Semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wanita harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Kegiatan organisasi wanita lebih banyak mendukung terhadap keberhasilan program dan kebijakan pemerintahan masa Orde Baru. Pengontrolan terhadap organisasi wanita pada awal pemerintahan Orde Baru telah berhasil mematahkan gerakan-gerakan wanita di Indonesia. Organisasi wanita masa ini lebih diutamakan kepada kepentingan dan kebijakan negara, sehingga masalah kedudukan serta hak-hak wanita menjadi kurang diperhatikan.

⁹ Saskia Wieringa, *op.cit.*, hlm. 34.

Pada bulan Januari 1973 pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan terhadap partai politik menjadi dua buah partai yaitu “Partai Persatuan Pembangunan” (dahulu NU, Parmusi, PSII dan Perti) dan “Partai Demokrasi Pembangunan” (dahulu PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan Partai Murba).¹⁰ Penyederhanaan ini berdampak kepada keadaan dan kegiatan yang biasa dilakukan organisasi wanita pada sebelumnya. Ketika masa Orde Lama keadaan organisasi wanita lebih bercorak politik dan berafiliasi dengan partai politik. Kegiatan-kegiatan organisasi wanita lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik.

Organisasi wanita ketika masa Orde Baru banyak ditandai dengan berkembangnya beberapa organisasi istri, seperti organisasi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Orde Baru bukanlah yang mengawali munculnya dan berkembang organisasi istri, tetapi organisasi istri sudah lama muncul dan berkembang ketika masa Orde Lama. Organisasi istri ketika masa Orde Lama masih tetap diperbolehkan berdiri tetapi mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintah melakukan perubahan-perubahan di dalam organisasi istri yang sudah berdiri sejak masa sebelumnya. Perubahan yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap organisasi istri yang terdahulu, membuat organisasi wanita sebelumnya tidak berdaya dengan adanya peraturan dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

¹⁰ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*. 1984, Jakarta: Rajawali, hlm. 179.

Pemerintahan Orde Baru mengubah sistem keanggotaan dan kegiatan-kegiatan organisasi wanita termasuk organisasi istri. Masa Orde Baru mewajibkan bagi kaum wanita yang menjadi istri dari pegawai negeri untuk masuk dan menjadi anggota pengurus organisasi wanita. Ketika masa Orde Lama sistem keanggotaan lebih bersifat sukarela tidak mewajibkan bagi seluruh kaum istri pegawai untuk masuk dan menjadi anggota pengurus organisasi wanita. Kegiatan organisasi istri ketika Orde Lama sangat aktif dalam memperjuangkan nasib kaum wanita dalam mendapatkan kedudukan dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Pemerintah Orde Baru mengontrol segala kegiatan organisasi istri sehingga kegiatan-kegiatan organisasi hanya sebagai kumpulan para istri pegawai.

Pemerintahan Orde Baru mendirikan beberapa organisasi istri yaitu organisasi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Organisasi Dharma Wanita adalah organisasi untuk para istri PNS. Organisasi Dharma Pertiwi adalah organisasi untuk para istri ABRI. Organisasi Dharma Wanita merupakan suatu wadah bagi berkumpulnya istri-istri yang suaminya berkerja sebagai Pegawai Republik Indonesia. Organisasi Dharma Pertiwi merupakan suatu wadah bagi berkumpulnya para istri dari kalangan militer yaitu ABRI dan Polisi. Pemerintah Orde Baru melalui organisasi istri yang didirikan ini memudahkan untuk melakukan pengontrolan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wanita.

Organisasi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, merupakan penjinakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kaum wanita diwajibkan untuk melakukan isi dari panca Dharma Wanita yaitu istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan generasi penerus bangsa, pengatur rumah tangga, pekerja penambah hasil keluarga, anggota masyarakat yang berguna.¹¹ Pada masa Orde Baru terjadi penindasan terhadap hak-hak kaum wanita dengan mewajibkan kaum wanita untuk melaksanakan panca Dharma Wanita.¹² Ideologi Orde Baru menempatkan bahwa wanita yang baik adalah ibu serta istri yang harus taat dan mengabdikan hidupnya terhadap sang suami.

Pada masa pemerintahan Orde Baru organisasi Dharma Wanita merupakan organisasi wanita terbesar dan memiliki jumlah anggota yang banyak. Jumlah anggota organisasi Perwari ketika masa Orde Baru mengalami pengurangan karena anggota Perwari dipaksa untuk masuk dan menjadi anggota Dharma Wanita.¹³ Kekuatan organisasi Perwari akhirnya melemah karena banyak kehilangan anggotanya.

Organisasi kaum wanita ketika masa Orde Baru tidak hanya diwarnai dengan organisasi wanita yang bersifat istri pegawai dan karyawan. Organisasi wanita berdasarkan profesi dan organisasi wanita daerah juga

¹¹ Soe Tjen Marching, *Kisah di Balik Pintu*. Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm.10.

¹² Panca Dharma Wanita, dapat dilihat pada lampiran hlm. 128.

¹³ Susan Blackburn, *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern*. Jakarta: Kalyanamitra, 2009, hlm. 48.

muncul mewarnai keanekaragaman organisasi wanita Indonesia ketika masa Orde Baru. Organisasi wanita berdasarkan profesi seperti Persatuan Wanita Olah raga Seluruh Indonesia (PERWOSI), Ratna Budaya, Dharma Santi, dan Ratna Busana.¹⁴ Hadirnya organisasi wanita berdasarkan profesi ini menunjukkan bahwa kaum wanita ketika masa Orde Baru diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah. Organisasi wanita berdasarkan profesi merupakan sarana untuk membantu kaum wanita dalam menunjang karir mereka dalam pekerjaannya.

Pada masa Orde Baru bukan hanya kaum wanita yang berada di pusat untuk mendirikan organisasi wanita. Para kaum wanita yang berada di berbagai daerah di Indonesia mendirikan organisasi wanita. Organisasi wanita ini dibentuk oleh kaum wanita daerah dan sifatnya kedaerahan, seperti kaum wanita yang berasal dari Manado mendirikan “Ikatan Ibu Kuwanua”, dan kaum wanita dari daerah Jambi mendirikan “Persatuan Wanita Jambi”.¹⁵ Organisasi wanita di daerah menunjukkan eksistensi mereka sebagai kaum wanita yang mewakili daerah mereka masing-masing. Organisasi daerah meskipun bersifat organisasi kedaerahan akan tetapi organisasi ini tetap menjalin hubungan dengan organisasi yang

¹⁴ Organisasi Perwosi (Persatuan Organisasi wanita Olah Raga Seluruh Indonesia) yang mengembangkan peranan wanita dalam bidang olah raga, Ratna Budaya mengembangkan peranan wanita dalam bidang kesenian Jawa, Dharma Santi kegiatannya untuk membina kesehatan jiwa, dan Ratna Busana kegiatannya untuk memupuk rasa cintanya terhadap pakaian tradisional. Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, 174.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.175.

berada di pusat. Hadirnya organisasi istri merupakan pelengkap dari keaneka ragaman organisasi wanita ketika masa Orde Baru.

Perkembangan organisasi wanita ketika masa Orde Baru lebih beragam dibandingkan dengan masa sebelumnya. Masa Orde Baru banyak bermunculan beberapa organisasi wanita yang lebih beragam macam organisasi wanita ada organisasi istri, organisasi wanita profesi, dan organisasi di daerah. Organisasi wanita yang beragam belum tentu menunjukkan peningkatan pergerakan kaum wanita. Pergerakan kaum wanita ketika masa Orde Baru justru mengalami kemunduran dibandingkan masa sebelumnya, karena organisasi wanita tidak lagi aktif dalam memperjuangkan nasib kaum wanita dan dibuat tidak berdaya oleh peraturan yang ditetapkan pemerintahan Orde Baru terhadap organisasi wanita.

Organisasi wanita yang lahir pada masa Orde Baru ini membawa pola tersendiri bagi perjalanan organisasi wanita di Indonesia. Pola organisasi wanita masa Orde Baru menghasilkan hubungan antara organisasi wanita dengan penguasa terlihat dari dua organisasi besar yang berdiri ketika masa Orde Baru yaitu: organisasi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Organisasi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi merupakan alat kekuasaan politik dari penguasa Orde Baru dan sebagai pendukung pemerintahan dalam mensukseskan program kebijakan pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru menempatkan fungsi organisasi wanita sebagai suatu gerakan masyarakat. Organisasi Dharma Wanita merupakan

wadah berkumpulnya para wanita. Organisasi wanita pada masa Orde Baru digunakan untuk mensukseskan program pembangunan nasional. Masa Orde Baru orientasi gerakan organisasi-organisasi dalam pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas wanita sebagai individu maupun sebagai sumber daya insani pembangunan.
2. Peningkatan kesempatan wanita dalam berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.¹⁶

Pemerintah Orde Baru mewajibkan agar organisasi wanita ikut berperan dalam setiap program kegiatan dan kebijakan pemerintah. Orientasi yang diarahkan oleh pemerintah Orde Baru agar kaum wanita dapat ikut serta mensukseskan pembangunan.

B. Kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap Kaum Wanita.

Pembentukan SEKBER GOLKAR pada tanggal 20 Oktober 1964 merupakan awal mulanya diselenggarakannya Musyawarah SEKBER GOLKAR.¹⁷ SEKBER GOLKAR berada dibawah pengaruh Angkatan Bersenjata.¹⁸ Masa Orde Lama kekuatan politik terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan komunis dan golongan non komunis. Kekuatan

¹⁶ Siti Aisyah, (1998), "Orientasi dan Strategi Pergerakan Wanita Indonesia". Dalam Bainar (ed), *Wacana Perempuan dalam ke Indonesia dan ke Modernan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesido, hlm. 300.

¹⁷ SEKBER GOLKAR adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya.

¹⁸ Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, hlm.170.

politik golongan komunis kekuasaannya begitu kuat, maka dibentuk SEKBER GOLKAR untuk membendung kekuatan golongan komunis.

SEKBER GOLKAR terdiri dari golongan-golongan fungsional dan profesi yang tidak tergabung dalam partai-partai politik, salah satu diantaranya adalah organisasi wanita. Melemahnya kekuatan politik golongan komunis berdampak kepada melemahnya pemerintahan Orde Lama saat itu. Masa transisi dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru perlu diselenggarakan Musyawarah SEKBER GOLKAR untuk berjuang bersama-sama untuk membangun pemerintahan Orde Baru dan mengakhiri pemerintahan Orde Lama.

Pada Desember tahun 1965 diselenggarakannya Musyawarah Kerja Bersama SEKBER GOLKAR (Sekretariat Bersama Golongan Karya). SEKBER GOLKAR mengikut sertakan 23 organisasi wanita untuk menjadi anggota yang tergabung dalam Koordinasi Wanita SEKBER GOLKAR.¹⁹ Masuknya organisasi wanita secara otomatis mereka dilibatkan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan selama pemerintahan Orde Baru.

Organisasi wanita dalam SEKBER GOLKAR ikut mendukung dan menentukan kebijakan pemerintah. Organisasi wanita diperbolehkan untuk melakukan kegiatan seperti menyampaikan pendapat dan saran mereka mengenai kebijakan pembangunan di masa pemerintahan Orde Baru.

¹⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 97.

Organisasi wanita lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut mengenai peranan kaum wanita dalam pembangunan, hal ini membuat perbaikan nasib kaum wanita kurang diperhatikan.

Koordinasi wanita SEKBER GOLKAR bukan merupakan federasi namun sebagai suatu wadah kerja sama organisasi wanita dalam lingkungan Sekretariat Bersama Golongan Karya. Pada tahun 1971 Koordinasi wanita SEKBER GOLKAR menjadi kosi wanita GOLKAR. Kosi wanita SEKBER GOLKAR aktif juga dalam menyiapkan konsepsi-konsepsi menjelang Kowani tahun 1974.²⁰ Kosi wanita aktif dalam menyiapkan Kowani memperlihatkan bahwa KOSI GOLKAR tidak hanya aktif di dalam saja tetapi aktif juga di luar kegiatan SEKBER GOLKAR.

Tahun 1973 organisasi wanita dan tokoh-tokoh wanita diikutsertakan menjadi anggota "Golongan Karya".²¹ Pembentukan Golongan Karya karena organisasi wanita semakin aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Golongan Karya saat itu dianggap dapat memahami tentang persoalan-persoalan yang dialami masyarakat dan melalui Golongan Karya masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka. Pada masa Orde Baru Golongan Karya merupakan kekuatan politik yang kuat. Kaum wanita dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan politik di dalam Golongan Karya meskipun tidak sebebaskan ketika masa Orde Lama.

²⁰ Nani Soewondo, *loc.cit.*

²¹ Sukanti Suryochondro, *loc.cit.*

Gerakan wanita yang radikal menjadi hal yang berbahaya bagi pemerintah Orde Baru oleh sebab itu pemerintah sangat mengatur gerakan kaum wanita. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara agar pergerakan kaum wanita radikal tidak terjadi kembali. Pemerintah Orde Baru mengarahkan organisasi wanita untuk lebih fokus terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada masa pemerintahan Orde Baru kaum wanita tidak hanya diawasi segala kegiatannya, tetapi pemerintah mengikut sertakan peranan kaum wanita pada pembangunan nasional. Pada tahun 1973 Suparjo Rustam yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menginstrusikan:

“bahwa jika dulu pembangunan bangsa semata-mata menjadi tanggung jawab negara, sekarang sudah saatnya seluruh penduduk Indonesia jenis kelamin laki-laki maupun wanita memikul tanggung jawab dan terlibat dalam proses ini”.²²

Intruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam merupakan sebuah titik awal dari pembentukan organisasi PKK. Pemerintah melibatkan kaum wanita dalam proses pembangunan akan tetapi peranan kaum wanita dalam membentuk keluarga yang sejahtera tidak boleh ditinggalkan karena melalui keluarga yang sejahtera merupakan bagian dari proses pembangunan. Organisasi PKK ini dibentuk agar kaum wanita lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara membangun keluarga yang sejahtera.

²² Irwan Abdulah, *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 276.

Perjuangan yang dilakukan oleh kaum wanita semasa Orde Lama mengenai undang-undang perkawinan akhirnya dapat terwujud ketika masa Orde Baru. Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan undang-undang perkawinan yang mengatur pegawai negeri laki-laki untuk tidak melakukan poligami.²³ Undang-undang perkawinan ini sudah lama diperjuangkan oleh kaum wanita ketika masa Orde Lama. Kaum wanita ketika masa Orde Lama sangat menentang poligami yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan menuntut agar segera mensahkan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan ini membuat kaum wanita senang meskipun undang-undang perkawinan ini hanya mengatur pegawai negeri laki-laki. Undang-undang perkawinan pada awalnya ditentang oleh kalangan politisi Islam, karena di dalam ajaran Islam poligami tidak dilarang.

Pemerintah Orde Baru juga selain mengatur kaum wanita dalam aturan dan kebijakan, tetapi pemerintah juga mulai merencanakan pembentukan Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita. Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita dibentuk pada tahun 1974 ketika Kabinet Pembangunan.²⁴ Pemerintah Orde Baru berharap dengan dibentuknya Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita dapat memberdayakan kaum wanita di luar rumah.

²³ Muhadjir Darwin, 2004, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 7, No.3.Maret, hlm. 289.

²⁴ *Ibid.*

Pemerintah Orde Baru juga menetapkan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tentang peranan kaum wanita dalam pembangunan. Pada bulan Maret tahun 1978 wakil-wakil rakyat yang berada di gedung DPR dan MPR menetapkan secara “*expresif-verbis*”, bahwa kaum wanita diikutsertakan di dalam pelaksanaan pembangunan.²⁵ Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi peningkatan peran kaum wanita, karena pada tahun ini pemerintah mengatur peran dan status sosial wanita secara eksplisit dalam GBHN.

Pemerintah Orde Baru meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru mendirikan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita.²⁶ Pembentukan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita untuk meninjau peranan kaum wanita dalam pembangunan nasional. Ditetapkannya kaum wanita dalam GBHN membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru begitu memberikan perhatian yang khusus bagi peranan kaum wanita dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada masa Orde Lama pembangunan nasional hanya dilaksanakan oleh para pejabat pemerintahan dan masyarakat hanya untuk mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan. Masa pemerintahan Orde Baru mulai menyadari bahwa kaum wanita mempunyai peran yang sangat penting

²⁵ Hardjito Notopuro, *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979, hlm. 24.

²⁶ Yulfita Rahardjo, 1995, “Perbedaan antar Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita”. dalam T.O Ihromi (Ed). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 10.

dalam terlaksananya pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya menjadi urusan kaum laki-laki akan tetapi kaum wanita sebagai warga negara wajib ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu hadirnya kaum wanita menjadi hal yang penting.

Peranan wanita dalam masa Pembangunan merupakan bagian dari sosial budaya yang tertera didalam GBHN. Perihal tentang “Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa” menentukan:

- a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang, oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
- b. Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia seutuhnya.
- c. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu untuk ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.²⁷

Pada point yang pertama menekankan mengenai peranan kaum wanita di dalam pembangunan di segala bidang menjelaskan bahwa kaum wanita ikut serta dalam pembangunan di berbagai bidang. Kaum wanita juga mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki sehingga kaum wanita pantas untuk memperjuangkan segala haknya. Kaum wanita juga mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki yaitu dalam tercapainya pembangunan nasional. Kaum wanita juga diberikan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26.

kesempatan untuk melakukan segala kegiatan yang menunjang tercapainya pembangunan.

Pada point kedua menekankan bahwa peranan kaum wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya di dalam keluarga. Peran kaum wanita di dalam pembinaan keluarga tetap dapat dijalankan meski kaum wanita diikut sertakan pada peranannya di dalam pembangunan. Salah satu peranan kaum wanita di dalam keluarga yaitu sebagai pembina generasi muda. Pembinaan generasi muda tidak terlepas dari peran seorang kaum wanita sebagai seorang ibu. Seorang ibu mendidik, membentuk, membina anaknya agar menjadi generasi muda.

Point yang ketiga menentukan bahwa kaum wanita perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan tidak terlepas peranan kaum wanita di dalam pembangunan. Kaum wanita dirasakan perlu untuk meningkatkan pengetahuan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam pembangunan. Bukan hanya dalam masalah pengetahuan yang perlu ditingkatkan, akan tetapi dalam keterampilan kaum wanita di berbagai bidang. Kaum wanita ketika masa Orde Baru diharuskan mempunyai pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya agar kaum wanita dapat berperan sebagai pelaksana pembangunan pada masa itu.

GBHN merancang segala hal yang menjadi tugas utama kaum wanita antara lain, pertama kaum wanita sebagai pasangan yang tergantung pada

suami, kedua kaum wanita sebagai pembentuk bangsa, ketiga kaum wanita dilihat sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, keempat kaum wanita sebagai pengurus rumah tangga, kelima kaum wanita merupakan bagian dari masyarakat.²⁸ Kaum wanita diikut sertakan dalam pembangunan tetapi tugas dan peran kaum wanita di dalam keluarga tidak bisa ditinggalkan. Tugas wanita di dalam keluarga sangat berkaitan dengan peranan kaum wanita dalam pembangunan. Kelima tugas kaum wanita yang tertera di dalam GBHN menyangkut kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Departemen dalam Negeri telah menjabarkan tugas utama kaum wanita didalam GBHN. Presiden Soeharto memperkuat tugas kaum wanita di dalam pidatonya pada acara pembukaan Musyawarah Nasional IV Dharma Wanita pada tanggal 12 April 1994 di Istana Negara, dengan mengatakan:

“Tidak kalah penting daripada fungsi sebagai istri adalah para anggota Dharma Wanita juga sebagai ibu. Fungsi seorang ibu sungguh sangat penting. Dharma Wanita akan dapat memberikan sumbangannya terhadap pembangunan, jika memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya agar mereka dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik”.²⁹

Pidato yang diungkapkan oleh Presiden Soeharto di acara pembukaan Musyawarah Nasional IV Dharma Wanita menegaskan bahwa tugas dari seorang kaum wanita bukan hanya sebagai seorang istri yang

²⁸ Siti Fatimah, (2012), “Wacana Gender Dan Gerakan Perempuan”. Dalam Taufik Abdullah (Ed), *Indonesia Dalam Arus Sejarah bagian Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, hlm.240

²⁹ *Ibid.*, hlm. 250.

mendampingi sang suami dalam menjalankan tugasnya. Tugas kaum wanita sebagai seorang ibu juga merupakan tugas kaum wanita yang sangat penting karena ibu yang baik akan menciptakan generasi penerus yang baik. Kaum wanita sebagai anggota Dharma Wanita tidak boleh melupakan tugas mereka sebagai ibu yang mendidik dan menciptakan generasi yang baik meskipun mereka mempunyai tugas sebagai istri yang mendampingi tugas dari sang suami sebagai pegawai negeri Republik Indonesia. Kaum wanita dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dapat memberikan sumbangan perannya di dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada GBHN tahun 1988-1993 menjelaskan mengenai kaum wanita yang baik, peranan kaum wanita dalam pembangunan, peningkatan kemampuan kaum wanita, pembentukan organisasi PKK.³⁰ Kaum wanita yang baik adalah seorang wanita yang terus meningkatkan peranannya di dalam pembangunan tetapi tidak pernah melupakan kodrat, harkat, dan martabat dari wanita itu sendiri. Kaum wanita mempunyai tanggung jawab dalam mensukseskan pembangunan nasional. Peranan kaum wanita dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan mengembangkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Peningkatan kemampuan kaum wanita perlu ditingkatkan lagi untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional. Pembentukan organisasi PKK oleh pemerintah Orde Baru agar dapat mendorong partisipasi kaum wanita dalam pembangunan.

³⁰ Manus, *Peranan Wanita Pada Masa Pembangunan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993, hlm. 11-12.

Kaum wanita diatur juga dengan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru berupa berdirinya organisasi-organisasi istri. Kebijakan ini telah membuat subordinat dan superioritaskan kaum laki-laki.³¹ Kebijakan publik ini begitu menegaskan tentang posisi wanita yang berada dalam bayang-bayang identitas sang suami.

Demi menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan pada GBHN dan Sapta Krida pembangunan II. Para istri pegawai RI berkewajiban untuk ikut serta secara aktif menurut bidangnya masing-masing. Usaha yang dilakukan oleh para istri demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara mendukung perjuangan dan mensukseskan suaminya dalam mengemban tugasnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.³² Pemerintah mendirikan organisasi istri yang sehaluan agar dukungan para istri lebih terarah dan lebih berdaya guna. Organisasi istri dibentuk untuk menghimpun dan membimbing usaha yang dilakukan oleh para istri dalam mendukung perjuangan suami yang mengemban tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.

Pemerintah Orde Baru menempatkan serta mengatur kaum wanita dalam kebijakan publik. Kebijakan publik ini mencerminkan seorang wanita yang harus taat dan patuh terhadap kaum laki-laki. Seorang wanita yang baik digambarkan dengan sosok kaum wanita yang penurut dan

³¹ Siti Fatimah, *loc.cit.*

³² Nani Soewondo, *loc.cit.*

tunduk terhadap perintah sang suami. Kebijakan publik ini tidak menutup kemungkinan adanya peluang, kaum lelaki semena-mena terhadap kaum wanita yang nanti akhirnya dapat mengarah kepada kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Kaum wanita ketika masa Orde Baru diwajibkan untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi istri. Para istri yang suaminya bekerja sebagai pegawai negeri atau karyawan departemen negara diwajibkan untuk berpartisipasi menjadi anggota Organisasi Dharma Wanita. Para istri yang suaminya bekerja dikalangan militer diwajibkan ikut berpartisipasi dan masuk menjadi anggota organisasi Persit Kartika Candra Kirana.³³ Bagi istri-istri profesional mereka memasuki organisasi istri yang menaungi profesi suaminya seperti, istri dari dokter masuk menjadi anggota organisasi Persatuan Istri Dokter Indonesia.

C. Berdirinya Organisasi Dharma Wanita

Latar belakang didirikannya organisasi Dharma Wanita untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam GBHN dan Sapta Krida Kabinet Pembangunan II.³⁴ Di dalam GBHN dijelaskan bahwa bagi seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki ataupun wanita mempunyai kewajiban untuk turut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan. Para istri Pegawai Republik Indonesia juga

³³ Persit Kartika Candra Kirana merupakan organisasi istri Tentara AD.

³⁴ Kowani, *op. cit.*, hlm. 279.

berperan sebagai istri yang mendampingi suami di dalam rumah tangga dan menjadi pendamping sang suami dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Agustus 1974 pemerintah Orde Baru membentuk sebuah organisasi istri yang bernama Organisasi Dharma Wanita.³⁵ Organisasi Dharma Wanita merupakan suatu wadah bagi para istri dari Pegawai Republik Indonesia untuk bertemu dan berkumpul. Organisasi Dharma Wanita para istri dihimpun serta dibimbing dalam kegiatan usaha menyalurkan kegiatannya dalam mendukung tugas dari sang suami sebagai Pegawai Republik Indonesia.

Organisasi Dharma Wanita berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi Dharma wanita juga berpedoman kepada GBHN.³⁶ Organisasi Dharma Wanita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Organisasi Dharma Wanita dalam melakukan segala tindakan tidak bisa terlepas dari nilai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai pancasila dan undang-undang 1945 sangat dijunjung tinggi dalam organisasi ini. GBHN sudah mengatur segala hal mengenai peran kaum wanita oleh karena itu organisasi Dharma Wanita berpedoman kepada GBHN dalam melakukan peranannya dalam pembangunan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Pemerintah Orde Baru membentuk organisasi Dharma Wanita mengingat bahwa pentingnya organisasi para istri dalam mendukung perjuangan sang suami sebagai Pegawai Republik Indonesia dalam mengemban tugasnya sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat.³⁷ Organisasi Dharma Wanita dibentuk sesuai dengan pola organisasi wanita yang diberlakukan oleh Pemerintah orde Baru. Pembentukan organisasi Dharma Wanita para istri searah dan sehaluan dengan tugas dari Pegawai Republik Indonesia.

Organisasi Dharma Wanita memiliki tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang berkeimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya organisasi Dharma Wanita mempunyai tujuan dan maksud.³⁸ Didirikannya Organisasi Dharma Wanita dapat membimbing para istri pegawai untuk mempunyai rasa tanggung jawab kepada negara. Berkumpulnya para istri dalam sebuah wadah yaitu Organisasi Dharma Wanita agar para istri terarah kegiatan-kegiatannya dan selaras dengan tugas sang suami sebagai Pegawai Republik Indonesia.

³⁷ Sukanti Suryochondro, 1995, "Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia". dalam T.O Ihromi (Ed). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 63.

³⁸ Tujuan dan maksud didirikan Organisasi Dharma Wanita yang tertera dalam AD/ ART Dharma Wanita, dapat dilihat dalam lampiran AD/ ART. hlm. 116.

Organisasi Dharma Wanita dalam mencapai tujuannya melakukan beberapa usaha yang dilakukan. Usaha-usaha yang dilakukan Organisasi Dharma Wanita antara lain:

1. Membimbing dan membina organisasi istri pegawai dalam rangka pemupukan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan serta senasib dan seperjuangan.
2. Membimbing dan membina organisasi istri pegawai dalam rangka peningkatan partisipasinya guna mensukseskan pembangunan nasional sesuai dengan kodrat dan kedudukan wanita Indonesia sebagai istri dan ibu rumah tangga.
3. Menyelenggarakan pendidikan terhadap istri pegawai untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ber Negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.³⁹

Usaha yang dilakukan organisasi Dharma Wanita lebih terfokuskan kepada pembimbingan dan pembinaan terhadap istri pegawai. Pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan organisasi Dharma Wanita memupuk rasa persatuan sesama anggota organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita juga melakukan peningkatan-peningkatan dalam pendidikan bagi sang istri pegawai negeri, dengan meningkatkan pendidikan maka kaum istri dapat lebih mempertanggung jawabkan perannya sebagai ibu dan pelaksana dalam pembangunan.

Dharma Wanita menurut bahasa sansekerta menyatakan secara tidak langsung peranan yang telah ditakdirkan bagi kaum wanita. Organisasi Dharma Wanita dalam bahasa inggris mengandung pengertian “organisasi

³⁹ Kowani, *op.cit.*, hlm. 280.

untuk membantu kaum wanita”.⁴⁰ Kaum wanita yang masuk dalam organisasi ini merupakan para istri yang suaminya bekerja sebagai pegawai negeri atau penjabat pemerintahan.

Organisasi Dharma Wanita sebenarnya berakar dari pemikiran militer, yang berasal dari organisasi wanita militer yaitu Persit (Persatuan Istri Tentara) dan Bhayangkari (Persatuan Istri Polisi). Organisasi istri dari kalangan ABRI yang sebenarnya mempunyai sifat dan struktur organisasi seperti ini.⁴¹ Organisasi istri ketika masa sebelumnya mereka sifatnya tidak terikat dan bebas melakukan aktivitas mereka, namun memasuki masa Orde Baru mereka menjadi organisasi wanita yang terikat.

Pemerintah menerapkan sifat dan struktur yang sama dengan organisasi istri dari kalangan ABRI kepada organisasi istri. Sifat organisasi istri ini menjadi organisasi persatuan. Organisasi Dharma Wanita menerapkan struktur yang sama dengan organisasi istri ABRI yaitu mengikuti jabatan sang suami. Istri dari kepala staf ini secara otomatis menjadi ketua di dalam organisasi, dan istri penjabat lainnya ditempatkan sesuai dengan jabatan sang suami.

Pemerintah Orde Baru takut dan trauma akan terjadi kembali peristiwa tahun 1965 yang melibatkan organisasi wanita berhaluan komunis yaitu Gerwani, oleh karena itu pemerintah Orde Baru mengawasi dengan ketat

⁴⁰ Kathryn Robinson. (2001). “Wanita: Dikotomi Versus keragaman”. Dalam Donald. K. Emerson (Ed), *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, hlm. 434.

⁴¹ Siti Fatimah, *op.cit.*, hlm. 241.

gerakan kaum wanita. Pada saat sebelum peristiwa tahun 1965 politik golongan kiri mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap organisasi wanita. Pemerintah Orde Baru memiliki cara agar peristiwa tahun 1965 tidak terjadi kembali yaitu dengan mengkaitkan organisasi istri terhadap pekerjaan suami, dengan cara seperti ini pemerintah dapat mengontrol segala kegiatan organisasi wanita dan menjinakan organisasi wanita dalam kebijakan pemerintah.

Organisasi Dharma Wanita menganut asas wilayah yang dibagi dalam tingkat yaitu: tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat cabang.⁴² Organisasi Dharma Wanita pada tingkat pusat yaitu organisasi Dharma Wanita yang wilayah kerjanya berada di daerah pusat yaitu Jakarta. Organisasi Dharma wanita pada tingkat Daerah yaitu organisasi Dharma Wanita yang wilayah kerjanya berada di tingkat provinsi. Organisasi Dharma wanita pada tingkat cabang yaitu organisasi Dharma Wanita yang wilayah kerjanya berada di tingkat Kabupaten atau Kota madya.

Struktur organisasi Dharma wanita pada tingkat Pusat terdiri dari presidium Dharma wanita dan pengurus hariannya organisasi Dharma wanita. Pada organisasi Dharma Wanita di tingkat pusat dipimpin oleh presidium Dharma Wanita. Presidium Dharma Wanita terdiri dari seseorang yang mewakili dari masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan agung, Bank milik

⁴² Kowani, *op.cit.*, hlm. 280.

Negara.⁴³ Pengurus harian organisasi Dharma wanita sendiri merupakan anggota-anggota yang tergabung di dalam organisasi Dharma Wanita Pusat.

Pada organisasi Dharma Wanita di tingkat pusat selain adanya presidium Dharma Wanita dan pengurus harian terdapat pembina umum, penasihat utama, penasihat, dan dewan pimpinan pusat. Pembina umum di dalam organisasi Dharma Wanita tingkat pusat yaitu Bapak Soeharto selaku presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Penasihat utamanya, yaitu Ibu Tien Soeharto. Penasihat organisasi Dharma Wanita, yaitu Ibu Nelly Adam Malik. Dewan pimpinan pusat, yaitu dewan pembina KORPRI.⁴⁴ Presiden Soeharto selaku pembina utama mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi Dharma Wanita. Ibu Tien selaku istri dari Presiden Republik Indonesia menjadi penasihat umum. Tugas dari penasihat umum yaitu yang memberikan nasihat dan saran terhadap keberlangsungan organisasi Dharma wanita.

Pemerintah Orde Baru mewajibkan para istri dari Pegawai Republik Indonesia untuk masuk ke dalam organisasi Dharma Wanita. Jabatan ketua diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota. Memasuki masa Orde Baru organisasi istri tidak diraih melalui pemilihan, akan tetapi harus

⁴³ Struktur organisasi Dharma Wanita terdapat dalam AD/ ART organisasi Dharma Wanita, dapat dilihat dalam lampiran. hlm. 118.

⁴⁴ Kowani, *loc.cit.*

mengikuti dengan pola hierarki pemerintahan.⁴⁵ Jabatan sang istri di dalam organisasi mengikuti jabatan sang suami di dalam Departemen atau Lembaga. Jabatan ketua organisasi dipegang oleh istri dari kepala Departemen atau Lembaga. Sistem keanggotaan organisasi istri diwajibkan bagi sang istri yang suaminya berkerja sebagai Pegawai Republik Indonesia.

Organisasi Dharma Wanita adalah organisasi istri yang sifatnya persatuan. Anggota-anggota yang ada di dalam organisasi Dharma Wanita terdiri dari organisasi-organisasi di Lingkungan Departemen-Departemen, Lembaga Tertinggi Negara, dan Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Pemerintah Daerah, Bank Milik Negara, dan Perusahaan Milik Negara.⁴⁶ Organisasi Dharma wanita saat itu menjadi payung bagi organisasi istri Pegawai Republik Indonesia.

Para istri dari Departemen-Departemen, Lembaga Tertinggi Negara, dan Kesekretariatan, Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Pemerintah Daerah, Bank Milik Negara, dan Perusahaan Milik Negara dilebur dalam organisasi Dharma Wanita. Peleburan para organisasi istri dari Departemen-Departemen, Lembaga Tertinggi Negara, dan Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Pemerintah Daerah, Bank Milik Negara, dan Perusahaan Milik Negara tetapi tidak dapat menghilangkan ciri khas dari setiap Departemen, Lembaga masing-masing. Peleburan berbagai

⁴⁵ Saskia Wieringa, *op.cit.*, hlm. 40.

⁴⁶ Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, hlm. 178.

organisasi istri dari masing Departmen dan Lembaga ke dalam organisasi Dharma Wanita menjadikan organisasi yang besar dan memiliki jumlah anggota yang banyak.

Musyawarah yang dilakukan organisasi Dharma Wanita terdiri dari: musyawarah nasional, musyawarah daerah, musyawarah cabang.⁴⁷ Musyawarah yang dilakukan oleh Organisasi Dharma wanita guna membahas mengenai AD/ART dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama setahun Dharma Wanita di tingkat daerah dan Dharma Wanita di tingkat cabang. Musyawarah Nasional dilakukan dalam waktu kurun setahun tahun sekali. Musyawarah nasional organisasi Dharma Wanita dilakukan di tingkat pusat, semua perwakilan organisasi Dharma wanita baik di tingkat daerah ataupun di tingkat cabang berkumpul di pusat. Perwakilan yang ikut serta di dalam musyawarah nasional adalah ketua Dharma wanita yang ada di tingkat daerah dan cabang.

Organisasi Dharma wanita selain melakukan musyawarah, organisasi ini melakukan rapat. Rapat Dharma Wanita terdiri dari: rapat presidium, rapat pengurus, rapat gabungan, konferensi, dan rapat anggota.⁴⁸ Rapat Presidium dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing Departemen dan Lembaga. Rapat pengurus dilakukan oleh pengurus harian Dharma wanita.

⁴⁷ AD/ART Dharma Wanita, dapat diihat dalam lampiran AD/ART hlm. 120.

⁴⁸ *Ibid.*

Rapat gabungan dilakukan oleh presidium dan pengurus harian. Konferensi dilakukan untuk berunding guna memecahkan suatu masalah di dalam organisasi Dharma Wanita. Rapat anggota adalah rapat yang dilakukan oleh anggota-anggota organisasi Dharma Wanita.

Organisasi Dharma wanita sama dengan organisasi lainnya yang membutuhkan pemasukan keuangan bagi organisasi. Sistem keuangan dikelola sendiri oleh anggota-anggota organisasi ini. Pemasukan organisasi Dharma Wanita berasal dari iuran, dan usaha-usaha yang dilakukan anggota. Setiap anggota organisasi Dharma Wanita diwajibkan untuk memberikan iuran kepada organisasi Dharma Wanita. Pemasukan keuangan organisasi ini selain iuran terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi, seperti para istri berjualan dan hasil dari penjualan dimasukkan ke dalam kas organisasi Dharma wanita.

Posisi kaum wanita sebagai rumah tangga terlihat dari pidato presiden Soeharto. Pada pidato pengarahan Presiden Soeharto di Istana Negara, ketika Munas Dharma Wanita III 5 April 1988 disebutkan, antara lain:

“...kaum wanita adalah memberikan sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Pembangunan masa yang akan datang akan dapat berhasil guna apabila dilaksanakan oleh manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang cerdas dan kuat kepribadiannya serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan budi pekerti yang luhur. Manusia yang demikian itu hanya bisa diwujudkan dari anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menjaga perannya sebagai ibu yang baik....”⁴⁹

⁴⁹ Siti Fatimah, *op.cit.*, hlm. 243.

Pidato yang disampaikan oleh Presiden Soeharto bahwa kaum wanita diharuskan berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah ketika masa Orde Baru selalu berusaha memposisikan kaum wanita sebagai ratu rumah tangga. Kaum wanita sebagai ratu rumah tangga yaitu dimulai dari mengurus suami, mengurus anak, dan mengurus segala keperluan rumah.

Kaum wanita yang baik adalah kaum wanita yang dapat menjaga perannya sebagai ibu yang baik. Kaum wanita mempunyai peran dalam pembangunan nasional. Kaum wanita juga berperan sebagai seorang ibu yang akan menghasilkan anak yang sehat jasmani dan rohani, yang cerdas dan kuat kepribadiannya serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dari budi pekerti yang luhur.

Pidato yang disampaikan oleh Dewan Pembina Dharma Wanita mengemukakan dan menekankan mengenai sifat dan peran yang dilakukan oleh anggota organisasi Dharma Wanita yaitu:

“Sifatnya yang khas dari organisasi Dharma Wanita adalah beranggotakan para istri pegawai negeri Republik Indonesia, sedangkan pegawai Republik Indonesia merupakan satu unsur pemerintah pelaksana pembangunan yang berperan sentral, karena pembangunan nasional sekarang ini masih bertumpu pada peran aktif pemerintah yang ditopang oleh partisipasi masyarakat sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, Dharma Wanita sebagai organisasi kemasyarakatan adalah sekaligus penyangga peran sebagai organisasi pendamping aparat pemerintah, abdi negara, abdi masyarakat yang memerlukan kualitas itu untuk suksesnya tugas pembangunan, disamping fungsi alamiah sebagai ibu rumah tangga...”⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

Kaum wanita diwajibkan untuk menyumbangkan perannya dalam pembangunan pada saat itu. Pada saat itu yang menjadi pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Organisasi Dharma Wanita dibentuk agar para istri ikut berperan serta dalam pembangunan dengan mendukung dan mendampingi pekerjaan sang suami sebagai pegawai Republik Indonesia. Organisasi ini memperlihatkan bahwa kaum wanita selain bertugas sebagai istri di dalam rumah tangga mereka juga sebagai penyumbang dalam pelaksanaan pembangunan dengan mendampingi para suami dalam menjalankan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan kodrat mereka sebagai ibu dan istri.